

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Pajak

2.1.1 Definisi pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu akan pengertian dari pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Dari uraian di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara membutuhkan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang (Richard dan Wirawan, 2004: 4). Secara umum, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas

negara dengan didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga pemungutan dalam hal pembayaran dapat bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung yang dirasakan oleh rakyat, namun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memenuhi kebutuhan yang utama bagi rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bayu, 2013: 1).

Ada beberapa penjelasan mengenai pajak menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan

untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai definisi pajak itu sendiri, maka dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak (Zain, 2003: 12) adalah:

- a). Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b). Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- c). Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d). Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

- e). Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara / Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulative*).

2.1.2 Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara untuk membiayai semua keperluan dan kebutuhan termasuk pengeluaran-pengeluaran untuk pembangunan negara. Dana pajak juga digunakan untuk melunasi utang negara serta bunga dari utang tersebut. Sebagai sumber pendapatan, pajak diharapkan bisa menjadi penopang kas untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya fungsi pajak ini dikenal dengan dua macam fungsi pajak (Sony dan Siti, 2006 :26) , yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang. Untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan pengeluaran yang akan dibiayai dengan penerimaan pajak.

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ini merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

Bayu (2014: 4) menjelaskan bahwa pajak mempunyai beberapa jenis fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2 Prinsip Pemungutan Pajak

Pada dasarnya, pengenaan pajak bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat yang secara tidak langsung merasakan manfaatnya seperti adanya jalan raya, pembangunan halte busway, taman kota dll. Berkenaan dengan sistem pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem (Adrian, 2013 : 30) yaitu:

1. *Official Assesment*

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparaturnya yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparaturnya pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparaturnya pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparaturnya perpajakan baik maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

2. *Withholding System*

Withholding System adalah perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assessment*).

3. *Self Assesment*

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a). Menghitung sendiri pajak yang terutang,

- b). Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
- c). Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar,
- d). Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Sedangkan syarat-syarat sistem *self assessment* dapat berhasil dengan baik apabila terdapat:

- a). Adanya kepastian hukum,
- b). Sederhana perhitungannya,
- c). Mudah pelaksanaan,
- d). Lebih adil dan merata,
- e). Perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tentang sistem-sistem pemungutan pajak diatas, dapat diketahui bahwa di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana pemerintah mempercayakan seluruh kegiatan perpajakan kepada wajib pajak sendiri.

Dalam pemenuhan kebutuhan ini dibutuhkan asas/dasar pengenaan pajak dimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang bahwa pemungutan pajak dilakukan secara memaksa bagi orang pribadi atau badan yang berkewajiban membayar tanpa memperoleh manfaatnya secara langsung. Asas/dasar pemungutan pajak ini dijadikan sebagai alat untuk pengenaan pajak agar proses pemungutan pajak dapat berjalan secara baik dan benar sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam penyusunan undang-undang pemungutan pajak itu sendiri negara membutuhkan dasar-dasar pengenaan pajak agar dapat mengenakan pajak kepada warga negaranya.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Four Maxim's* mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak (Adrian, 2013 : 29) adalah sebagai berikut:

1. Asas *Equality*

Dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

2. Asas *Certainty*

Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan saat pembayarannya.

3. Asas *Convenience*

Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak.

4. Asas *Efficiency*

Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.

5. Asas Ekonomi

Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar tidak menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, kenyamanan,

kesejahteraan, dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak (Sony dan Siti, 2006 : 54).

Sebagai fungsi *budgeter*, pajak digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu pemungutan pajak sebagai berikut.

- a). Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- b). Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak (Bayu, 2014 : 7), antara lain:

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Daya Pikul

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

2. Asas Manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas Kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas Kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

5. Asas Beban yang Sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Di negara Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya, Indonesia juga menganut sistem kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

2.2. Penggelapan Pajak

2.2.1 Definisi penggelapan pajak

Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam usahanya merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial negaranya, yang membutuhkan dana yang relatif cukup besar, menyebabkan pemerintah cenderung

untuk melakukan pemungutan pajak sampai pada tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Namun hal ini tidak selalu berlaku, apabila diingat bahwa sasaran utama pemungutan pajak adalah pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan/atau dari sektor swasta ke swasta lainnya.

Berdasarkan fungsi pemungutan pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemungutan pajak bertujuan untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Namun, tidak semua tujuan yang kita harapkan dapat tercapai tanpa adanya masalah. Dalam pemungutan tersebut sering kali kita jumpai pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk menghindari ataupun menggelapkan pajak agar dapat menguntungkan diri-sendiri. Salah satu contohnya adalah penggelapan pajak

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi penggelapan pajak, menurut Mardiasmo (2011) dalam Devi menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang. Dalam hal ini, wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi tanggung kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Sedangkan menurut Duadji (2008) penggelapan pajak adalah salah satu tindak pidana karena merupakan manipulasi subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan melanggar hukum dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan suatu hal yang melekat pada setiap sistem yang berlaku di tiap daerah.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar dengan cara yang tidak benar dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

2.2.2 Alasan terjadinya penggelapan pajak

Pembicaraan mengenai masalah perpajakan dapat didekati dari berbagai segi seperti segi hukum, segi sosiologi, segi ekonomi, segi akuntansi, segi administrasi dan seterusnya. Di dalam Undang-Undang Perpajakan 16 Tahun 2000 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), diatur beberapa pasal yang menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan terjadinya dan sanksi-sanksi atas Kejahatan/Pidana Perpajakan, yakni dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42, yang intinya dapat adalah bahwa kejahatan/tindak pidana perpajakan dapat terjadi dikarenakan (Andrian, 2013 : 280) :

- a. Adanya unsur kelapaaan, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
- b. Adanya unsur kesengajaan, seperti tidak mendaftarkan diri sebagai WP/PKP atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP/Pengukuhan PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT/keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, ataupun memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang

palsu/dipalsukan seolah-olah benar, tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya, ataupun tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Beberapa alasan mengapa ada pihak-pihak yang melakukan penggelapan pajak yang telah diteliti oleh McGee (2006) antara lain adanya ketidakadilan dalam sistem pembayaran, adanya penggunaan dana pajak yang dipakai tidak untuk kepentingan umum, adanya sistem pemerintahan yang buruk, adanya tarif pajak yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dan sebanding dengan manfaat yang diharapkan, adanya sistem hukum yang lemah dan tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran sehingga dengan mudah ada pihak yang melakukan penggelapan tersebut. Dengan adanya beberapa alasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan wajib pajak dalam pelanggaran seperti contohnya penggelapan pajak tujuan lain dari penggelapan ini yaitu untuk meminimalkan jumlah yang terbayar pajak.

Jika dilihat dari uraian atas unsur kesengajaan diatas yang menyebabkan kerugian negara, maka jika sistem perpajakan sudah bisa memberikan iklim yang kondusif bagi “insan perpajakan” dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam berusaha, sehingga tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak memenuhi segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, begitu juga dengan aparat pajak atau fiskusnya dalam melaksanakan kewajibannya dalam fungsi pelayanan publik (Adrian, 2013 : 281)

2.2.3 Motivasi adanya penggelapan pajak

Kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar pajak dalam penggelapan pajak akan berdampak besar terhadap kepercayaan wajib pajak lainnya dan hal ini akan menjadi masalah besar apabila masyarakat sudah tidak lagi peduli akan pentingnya pajak dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. Penjelasan tentang alasan adanya tindak kejahatan penggelapan pajak dapat disimpulkan bahwa motivasi adanya penggelapan pajak itu sendiri adalah memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan membayar pajak lebih sedikit dibanding yang seharusnya. Hal inilah yang menjadi acuan para pelaku penggelapan pajak sehingga mereka bisa menikmati keuntungan tersebut meskipun keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang ilegal dan melanggar undang-undang.

2.3 Sistem Administrasi Perpajakan

2.3.1 Definisi sistem administrasi perpajakan

Secara historis, pembicaraan mengenai masalah perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan, kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Dan, ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan stabil sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Apabila salah satu unsur lemah,

maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil.

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011), sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur, yakni kebijakan perpajakan (*Tax Policy*), undang-undang pajak (*Tax Law*) dan administrasi perpajakan (*Tax Administration*). Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T. Keban yaitu bahwa:

“Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis”.

Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama. Menurut Shopar Lumbantoruan, administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Sony dan Siti, 2006 : 72).

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan.

2.3.2 Peran sistem administrasi perpajakan

Sistem administrasi perpajakan, sangat berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan perpajakan di suatu negara yang dipilih.

Kebijakan perpajakan yang sudah dianggap baik dapat saja kurang sukses mencapai tujuan dalam pemenuhan pendapatan negara untuk kepentingan masyarakat apabila sistem administrasi perpajakannya gagal dan tidak mampu mencapai tujuannya. Dalam proses mencapai tujuan pemerintahan dalam sektor perpajakan maka sistem administrasi perpajakan berfungsi sebagai pengatur serta acuan dalam menjalankan proses perpajakan sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku.

Carlos A Silvani menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah (Sony dan Siti, 2006 : 72):

1. Wajib pajak yang terdaftar (*unregistered taxpayers*). Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar.

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Administrasi perpajakan efektif akan mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3. Penggelapan pajak. Yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.
4. Penunggak pajak. Yaitu upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut (Gunadi).

Pelaksanaan administrasi pajak yang baik tentunya perlu menerapkan manajemen modern, yang terdiri dari pelaksanaan perencanaan (*planning*) yang baik, pengorganisasian (*organizing*) yang tepat, pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang berkesimbangan. Menurut Gunadi dalam Marcus (2000 : 22) selain hal tersebut, juga perlu adanya kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan simple untuk memudahkan fiskus dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dan juga tersedianya pegawai pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki integritas. Yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan penegakan hukum (*tax law enforcement*) yang tegas dan konsisten.

Apabila tindakan dan keputusan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara untuk menyiapkan dana pelaksanaan fungsi pemerintahan itu

sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi, tentunya administrasi perpajakan negara yang ada dapat dikatakan baik, sehingga tujuan utama penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat.

2.3.3 Tujuan adanya sistem administrasi perpajakan

Pengukuran efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah berapa besarnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Hal inilah yang menjadi penentu akan peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Dengan mencapai tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, maka sistem administrasi perpajakan dijadikan alat atau cara agar wajib pajak dapat di arahkan untuk pengelolaan dana pajak dengan benar sesuai undang-undang yang berlaku serta mengurangi tingkat pelanggaran perpajakan sehingga dapat mengurangi juga dampak negative yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Pelaksanaan administrasi pajak yang baik tentunya perlu menerapkan manajemen modern, yang terdiri dari pelaksanaan perancangan (*Planning*) yang baik, perorganisasian (*Organizing*) yang tepat, pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) yang berkesinambungan. Selain itu juga perlu adanya kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan perundang-undan perpajakan yang jelas dan simple untuk memudahkan fiskus dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dan juga tersedianya pegawai pajak yang berkualitas, terampil, dan berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalama intelektual dan tentunya memiliki integritas. Yang tak

alah pentingnya adalah adanya pelaksanaan penegakana hukum (*tax law enforcement*) yang tegas dan konsisten.

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal (Sony dan Siti, 2006: 73).

Toshiyuki menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara, yaitu:

1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
2. Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan.
3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.
4. Dapat mencegah dan memberi sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisiensi dan efektif.
6. Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
7. Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.
8. Bisa memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat (Gunadi)

2.3.4 Reformasi sistem administrasi perpajakan

Sejak tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Terdapat begitu banyak pengertian mengenai reformasi perpajakan di berbagai negara maju maupun negara berkembang. Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat (Sony dan Siti, 2006: 73).

Secara garis besar, ada tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi administrasi perpajakan jangka menengah ini, yaitu :

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi,
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan,
- c. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Ketiga tujuan ini dipilih menjadi tujuan reformasi administrasi perpajakan, berdasarkan pengkajian yang dilakukan atas kondisi dan keberadaan DJP saat ini, serta prioritas yang hendak dicapai dalam jangka menengah. Program-program dan kegiatan yang dirancang untuk jangka menengah akan dirancang untuk mendukung ketiga tujuan diatas. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan, dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), perangkat keras, dan perangkat lunak. Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional merupakan program

reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitas, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity*. Reformasi perangkat keras diupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu, dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Sedangkan reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien (Sony dan Siti, 2006: 88).

Salah satu hambatan utama untuk tercapainya administrasi perpajakan yang efisien, ialah keanekaragaman ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak efektif lagi yang masih ada pada setiap pemerintahan. Sumber lainnya yang menyebabkan tidak efisiennya administrasi perpajakan, apabila pemerintah mengembangkan sistem perpajakan dimana yurisdiksi dari berbagai jenis pajak diserahkan pengelolaannya pada berbagai instansi dan kadang-kadang berbagai fungsi (Zain, 2003: 5).

Dengan sistem perpajakan yang ditentukan menurut undang-undang dapat memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Mengingat ketiga tujuan yang telah diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *Masterplan* dan program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

dengan memperkenalkan dan menerapkan pajak online DJP dimana aplikasi-aplikas tersebut terdiri dari :

1. e-Registration

Atau lengkapnya adalah e-registration merupakan metode pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan kartu NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang dilakukan secara online. e-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

2. e-SPT

Merupakan metode pengisian SPT dengan bantuan software. Hal ini tentu sangat membantu wajib pajak terutama wajib pajak badan karena banyak sekali item yang perlu diisikan ke dalam SPT. Dengan demikian efisiensi pengisian dan keakuratan pengisian SPT akan jauh lebih baik.

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

3. E-Billing

Adalah metode pembayaran pajak melalui internet atau mesin ATM. Untuk saat ini hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah dapat menerapkan sistem ini. Aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Meskipun penerapannya masih dalam tahap ujicoba, namun semua Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan fitur layanan ini.

4. E-Filing

Adalah Pengisian dan penyampaian SPT TAHUNAN melalui internet. Dengan fitur ini Anda tidak perlu mengisi formulir manual (konvensional), dan penyampaian pun cukup sekali klik melalui aplikasi internet sehingga Anda tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Meskipun penerapannya masih dalam tahap ujicoba, namun semua Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan fitur layanan ini.

5. E-Faktur

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-

Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. VAT Refund

VAT (*Value Added Tax*) Refund adalah proses Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor luar negeri (turis asing) dengan menerbitkan Faktur Pajak Khusus oleh PKP Toko Retail